

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu *good corporate governance* (GCG) berkembang pesat di seluruh dunia selama 10 tahun terakhir ini. Secara umum intuisi merasakan bahwa isu ini memang penting dan harus hadir di dunia bisnis pada umumnya, namun apa sebenarnya GCG itu masih belum banyak masyarakat yang memahaminya. Pada intinya GCG bukanlah merupakan kepentingan sebuah perusahaan serta para *stakeholder* terdekatnya belaka, namun juga merupakan urusan para *stakeholder* perusahaan secara luas yaitu masyarakat nasional dan internasional.

Indonesia mulai menerapkan GCG sejak menandatangani *Letter Of Intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC, 2002). Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 tahun 2002 tentang Penerapan Praktek *good corporate governance* pada BUMN, BUMN diwajibkan untuk menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan atau menjadikan *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya. PT PLN sebagai salah satu perusahaan BUMN, dan juga mempunyai peranan penting untuk menjalani kerjasama dengan perusahaan lain dan merupakan perusahaan satu-satunya yang bergerak dibidang usaha Jasa Pelayanan Penyediaan Ketenagalistrikan dan Pendistribusian di Indonesia. PT PLN (Persero) mulai menerapkan GCG beserta

umpan baliknya karena penerapan GCG dapat mengukur kinerja perusahaan, salah satunya dilihat dari kualitas laporan keuangan.

PT PLN (Persero) DJBB untuk menerapkan GCG yang baik dihadapkan dengan beberapa hambatan. Hambatan yang muncul terutama kurangnya pemahaman tentang GCG dan masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) menyebabkan laporan keuangan ada yang mengakomodir dan ada pula yang tidak. Informasi laporan keuangan yang disajikan sangat relevan tetapi kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan tidak terdapat transparansi dari pihak perusahaan terhadap masyarakat sebagai perusahaan milik negara. PLN sebagai perusahaan negara dituntut untuk bersikap profesional dengan transparansi laporan keuangan dan disamping mengurus kepentingan hajat hidup orang banyak dituntut pula untuk mendapatkan tambahan keuntungan karena subsidi yang diberikan oleh pemerintah semakin menurun.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip GCG saat ini di Indonesia adalah maraknya praktik korupsi, penggelembungan biaya, kolusi serta nepotisme yang masih tumbuh subur dan terus dipupuk dibanyak perusahaan swasta maupun pemerintah. Pemerintah Indonesia pun melakukan upaya-upaya khusus dan bergandengan tangan dengan komunitas bisnis dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan *good corporate governance* (GCG).

Hal tersebut terjadi pada PT PLN (Persero). Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa 3 direktur PT PLN sebagai saksi kasus dugaan korupsi *flame turbine* di PLTGU Belawan, Sumut. (<http://news.detik.com>)

Perekonomian Indonesia pada saat ini sudah lebih maju dibandingkan pada saat terjadinya krisis ekonomi, dilihat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Kemajuan dan penurunan perusahaan tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan, yang pada dasarnya menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Berbagai informasi dan kondisi keuangan perusahaan disajikan dalam laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan akan membantu para investor agar tidak salah dalam mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan.

Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan yang disajikan dapat terlihat lebih baik dan berkualitas. Setiap perusahaan tentu berlomba-lomba untuk menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan kemajuan setiap periodenya. Berbagai cara dilakukan termasuk dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini tentunya akan mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak berkualitas karena informasi yang disajikan tidak akurat.

Direktur Keuangan PLN, Setio Anggoro Dewo, mengatakan sebenarnya laba usaha perusahaan terus membaik dalam lima tahun terakhir. Pada 2008, laba yang didapat hanya Rp 3,6 triliun. Namun keuntungan meningkat pada tahun-tahun selanjutnya, yakni Rp 18,4 triliun (2009), Rp 20,7 triliun (2010), Rp 22,4 triliun (2011), dan Rp 34,7 triliun (2013). Meski laba usaha terus meningkat, laba bersih PLN tidak menunjukkan performa yang lebih bagus. Pada 2008, PLN bahkan merugi Rp 12,3 triliun. Namun pada 2009, perusahaan sempat mendapat laba bersih Rp 14,6

triliun. Baru setelah 2009, laba bersih perusahaan terus menurun menjadi Rp 10,3 triliun, Rp 5,4 triliun (2011), Rp 3,2 triliun (2012), dan anjlok menjadi Rp 30,9 triliun pada 2013. (<http://www.tempo.com>).

Menurut Lev dan Thiagarajan, 1993 dalam Zaenal Fanani (2009), laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila laba tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu laporan keuangan yang berkualitas juga dapat dilihat dari laporan keuangan yang bebas dari penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam perusahaan.

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang buruk dapat menyebabkan terjadinya *fraud* (kecurangan) sebagaimana yang terjadi pada beberapa bank di Indonesia. Mengingat bahwa akhir-akhir ini *corporate governance* merupakan salah satu topik pembahasan sehubungan dengan semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda tanya kecukupan (*adequacy*) *corporate governance*. Demikian pula halnya tentang kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dipertanyakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pergerakan kualitas laporan keuangan tergantung dari seberapa besar usaha perusahaan tersebut dalam melakukan perbaikan terhadap sistem dan tata kelola. Untuk membuat laporan yang berkualitas perlu diterapkannya tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* dengan

baik sehingga dapat terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan *good corporate governance* untuk mengukur kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui sejauhmana pengaruh antara penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan. yang disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (Persero)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan dan sehubungan dengan judul yang diangkat sebagai topik permasalahan, maka dalam menentukan identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.
2. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.
3. Berapa Besar Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi atas permasalahan yang ada, maka dapat dikemukakan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.
2. Kualitas Laporan Keuangan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.
3. Besar Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4.2 Kegunaan Operasional

Dari data dan informasi yang diperoleh yang kemudian diolah sehingga menghasilkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang muncul. Maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti, universitas, mahasiswa umum dan bagi dunia praktis.

Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Dalam upaya lebih memahami penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam suatu perusahaan.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori yang berkaitan dengan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan.

c. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan saran dan kritiknya bagi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dan perusahaan lainnya khususnya dalam menentukan kebijakan mengenai peningkatan kualitas laporan keuangan dan kinerja perusahaan melalui *good corporate governance*.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa

yang akan datang dan dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang terletak di Jalan Asia Afrika No.63, Bandung, Jawa Barat 40111. Peneliti melakukan penelitian dari bulan Desember 2014.

